

Yth.
Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25 /SEOJK.03/2016

TENTANG
RENCANA BISNIS BANK UMUM

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Rencana Bisnis Bank Umum dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka mencapai tujuan usaha yang berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, bank umum yang melaksanakan kegiatan secara konvensional, selanjutnya disebut Bank Umum, perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan asas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis, dan komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah kebijakan serta pengembangan usaha Bank Umum.
2. Agar penyusunan Rencana Bisnis dapat dilakukan secara komprehensif, cakupan Rencana Bisnis Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus secara konsolidasi mencakup pula Rencana Bisnis bagi UUS sebagai satu kesatuan. Rencana Bisnis untuk UUS disusun sebagai bagian tersendiri dari Rencana Bisnis Bank Umum.

3. Sejalan ...

3. Sejalan dengan penyusunan Rencana Bisnis secara komprehensif sebagaimana pada angka 2, Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi Bank Umum yang memiliki UUS juga harus secara konsolidasi mencakup laporan bagi UUS sebagai satu kesatuan laporan.
4. Penyusunan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi UUS mengacu pada Surat Edaran yang mengatur mengenai rencana bisnis bank umum syariah dan unit usaha syariah.

II. CAKUPAN DAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank, Rencana Bisnis Bank Umum paling sedikit mencakup ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank Umum saat ini, proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan, proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya, rencana pendanaan, rencana penanaman dana, rencana penyertaan modal, rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya. Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan bersifat minimum sehingga Bank Umum dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana pada angka I.

A. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini berisi penjelasan umum, baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai hasil yang telah dicapai pada tahun terakhir, antara lain aspek permodalan, rentabilitas, penilaian risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta dana pihak ketiga, dan rasio keuangan. Selain itu ringkasan eksekutif juga memuat target usaha Bank Umum dalam jangka pendek (1 tahun) sampai dengan jangka menengah (3 tahun).

Ringkasan eksekutif disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dan paling sedikit mencakup:

1. **Visi dan Misi Bank**
Bagian ini menguraikan visi dan misi yang menjadi tujuan Bank Umum pada masa mendatang.
2. **Arah Kebijakan Bank**
Bagian ini memberikan penjelasan mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan Bank Umum baik jangka pendek maupun jangka menengah.
3. **Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh Bank**
Bagian ini memberikan uraian mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank Umum untuk mencapai visi dan misi Bank Umum sesuai dengan arah kebijakan Bank Umum ke depan.
4. **Indikator Keuangan Utama**
Bagian ini antara lain memuat posisi aktual (per posisi bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) maupun proyeksi. Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis tahun 2017 sebagai berikut:

Indikator	Aktual	Proyeksi						
	Sep 2016	Des 2016	Tahun 2017				Des 2018	Des 2019
			Mar	Jun	Sep	Des		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)								
Rasio Modal Inti terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)								
Rasio Modal Inti Utama terhadap ATMR								
Rasio Modal Inti terhadap Total Aset								
<i>Return on Asset (ROA)</i>								
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>								
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)								

Indikator	Aktual	Proyeksi						
	Sep 2016	Des 2016	Tahun 2017				Des 2018	Des 2019
			Mar	Jun	Sep	Des		
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif								
Rasio Cadangan Kerugian Penutupan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif.								
Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) <i>Gross</i>								
Rasio NPL <i>Nett</i>								
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif								
Rasio Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Total Kredit								
Rasio Aset <i>Trading</i> , Tagihan Spot dan Derivatif, serta Aset <i>Fair Value Option</i> terhadap Total Aset								
Rasio Total Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek								
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)								

5. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Bagian ini menguraikan target atau fokus kegiatan usaha Bank Umum baik kuantitatif maupun kualitatif dalam jangka pendek maupun jangka menengah, sesuai dengan visi dan misi Bank Umum disertai dengan alasan pemilihan target, asumsi yang digunakan, dan strategi untuk mencapai target.

Target ...

Target jangka pendek, misalnya berupa target penurunan tingkat NPL, peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi. Sementara itu target jangka menengah, misalnya target pengembangan perbankan syariah dan target penerapan tata kelola.

B. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kebijakan dan strategi manajemen selama 1 (satu) tahun ke depan, yang paling sedikit memuat:

1. analisis posisi Bank Umum dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi Bank Umum baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Bank Umum. Dalam melakukan analisa posisi, Bank menggunakan pendekatan tertentu, paling sedikit berupa analisa *strengths, weaknesses, opportunities, dan threats* (SWOT);
2. kebijakan manajemen (*policy statements*), meliputi informasi umum kebijakan Bank Umum yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha Bank Umum pada waktu yang akan datang;
3. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko Bank Umum dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan;
4. strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Bank Umum yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal; dan
5. strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kebijakan remunerasi (*remuneration policies*), paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus, dan fasilitas lain yang bersifat

keuangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum, termasuk kepada pegawai.

C. Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja Bank Umum Saat Ini

Bagian ini berisi penjelasan baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai kondisi Bank Umum pada saat penyusunan Rencana Bisnis dan menyoroti hal-hal utama yang perlu mendapat perhatian atau permasalahan yang dihadapi serta hasil yang telah dicapai Bank Umum.

Bagian ini paling sedikit memuat uraian mengenai:

1. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk profil risiko untuk seluruh risiko

Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi evaluasi dan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis.

Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi penilaian Bank Umum mengenai tingkat dan tren untuk seluruh risiko.

Tata cara penyusunan profil risiko dan evaluasi penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan Bank.

Dalam uraian ini termasuk pula evaluasi mengenai efektivitas dan hasil penerapan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan yang mengatur mengenai fungsi kepatuhan Bank.

Dalam penjelasan mengenai fungsi kepatuhan Bank Umum dimuat rencana kerja kepatuhan untuk 1 (satu) tahun ke depan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai fungsi kepatuhan Bank.

2. Penerapan Tata Kelola

Uraian mengenai penilaian penerapan tata kelola berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi Bank.

3. Kinerja ...

3. Kinerja Keuangan, khususnya Permodalan (*Capital*) dan Rentabilitas (*Earnings*)

Uraian mengenai kinerja keuangan Bank Umum termasuk hasil pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka memperbaiki kinerja Bank Umum (jika ada) sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

Uraian mengenai kinerja permodalan mencakup kecukupan dan komposisi, serta kemampuan permodalan Bank Umum dalam mengcover risiko terhadap aset bermasalah, kemampuan Bank Umum untuk menambah modal dari laba operasional Bank Umum, kemampuan permodalan Bank Umum untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kemampuan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank Umum.

Uraian mengenai kinerja rentabilitas Bank Umum mencakup pencapaian *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), perkembangan dan prospek laba operasional, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan rasio beban operasional selain bunga terhadap pendapatan kegiatan utama.

4. Realisasi Pemberian Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Uraian mengenai realisasi pemberian kredit mencerminkan peranan Bank Umum dalam mendukung perkembangan UMKM. Pengelompokan UMKM mengacu pada kriteria usaha berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

5. Penerapan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Uraian mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah hanya diberlakukan bagi Bank Umum yang memiliki UUS.

D. Proyeksi Laporan Keuangan

Bagian ini memuat informasi mengenai kondisi keuangan Bank Umum posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bank) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.

Proyeksi tahun pertama disusun secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan ketiga disusun secara tahunan (posisi akhir tahun).

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud.

Asumsi makro antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, sedangkan asumsi mikro antara lain tingkat persaingan antar bank, pertumbuhan kredit industri perbankan, serta tingkat bunga kredit dan simpanan yang digunakan dalam menyusun Rencana Bisnis.

Proyeksi laporan keuangan disusun dengan mengacu pada:

1. Lampiran I : Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca)
2. Lampiran II : Proyeksi Laba Rugi
3. Lampiran III : Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi
4. Lampiran IV : Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

E. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

Bagian ini memuat rasio keuangan dan rasio tertentu lainnya posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Rasio Keuangan Pokok

Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling sedikit dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Proyeksi rasio-rasio tersebut antara lain rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, rasio ROA, rasio NIM, rasio *Non Performing Loan* (NPL), rasio aset likuid terhadap total aset, *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan rasio aset *trading*, tagihan spot dan derivatif, serta aset *Fair Value Option* terhadap total aset.

2. Pos-Pos Tertentu Lainnya

Proyeksi pos-pos tertentu lainnya meliputi proyeksi beberapa rasio terkait kredit kepada UMKM, rasio dana pendidikan, dan rasio aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank Umum terhadap modal.

Selain itu dicantumkan pula pos-pos tertentu yang memberikan informasi mengenai penghimpunan dana dan penyaluran dana. Proyeksi ini disusun dengan mengacu pada Lampiran V.

F. Rencana Pendanaan

Bagian ini mencerminkan posisi penghimpunan dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana serta strategi Bank Umum untuk merealisasikan rencana pendanaan.

Rencana pendanaan disusun dengan mengacu pada:

1. Lampiran VI : Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
2. Lampiran VII : Rencana Penerbitan Surat Berharga
3. Lampiran VIII : Rencana Pendanaan Lainnya

G. Rencana Penanaman Dana

Bagian ini mencerminkan posisi penanaman dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penyaluran dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan yang antara lain memberikan informasi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait, dan rincian rencana pemberian kredit, termasuk rencana pemberian kredit kepada kegiatan usaha tertentu. Jenis kegiatan usaha tertentu yang dicantumkan dalam rincian pemberian kredit mencerminkan fokus pemberian kredit Bank Umum berdasarkan jenis kegiatan usaha yang diprioritaskan, dan/atau signifikansi pangsa kredit maupun jumlah debitur.

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi Bank Umum untuk merealisasikan rencana penanaman dana.

Rencana penanaman dana ini disajikan dengan mengacu pada:

1. Lampiran IX : Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
2. Lampiran X.A. : Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur Inti

3. Lampiran X.B. : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu
4. Lampiran X.C.1 : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi
5. Lampiran X.C.2 : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan
6. Lampiran X.C.3 : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Provinsi
7. Lampiran X.D.1 : Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi
8. Lampiran X.D.2 : Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan
9. Lampiran X.D.3 : Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Provinsi
10. Lampiran XI : Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Surat Berharga
11. Lampiran XII : Rencana Penanaman Dana Lainnya

H. Rencana Penyertaan Modal

Bagian ini mencerminkan posisi penyertaan modal posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penyertaan modal untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan yang paling sedikit meliputi bidang usaha, perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan, dan persentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

Rencana penyertaan modal disusun dengan mengacu pada Lampiran XIII.

I. Rencana Permodalan

Bagian ini paling sedikit meliputi:

1. Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Proyeksi KPMM paling sedikit meliputi proyeksi modal, proyeksi Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan proyeksi rasio KPMM selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Proyeksi pemenuhan KPMM ini disusun dengan mengacu pada Lampiran XIV.A. untuk Bank selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau Lampiran XIV.B. untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Rencana Perubahan Modal

Rencana perubahan modal merupakan proyeksi perubahan modal selama 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur permodalan maupun jumlah modal.

Termasuk dalam rencana perubahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (*existing shareholders*), rencana *Initial Public Offering* (IPO), *right issue*, penerbitan surat utang yang bersifat ekuitas, dan rencana penambahan modal lainnya, serta uraian mengenai rencana perubahan atau penggantian kepemilikan (jika ada).

Rencana perubahan modal disusun dengan mengacu pada Lampiran XV.

J. Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Bagian ini menguraikan informasi mengenai struktur organisasi dan kondisi SDM terkini, rencana pengembangan organisasi dan SDM yang sedang berlangsung, maupun rencana pengembangan terkait SDM lainnya paling sedikit selama 1 (satu) tahun ke depan yang antara lain memuat:

1. Rencana Pengembangan Organisasi

Rencana pengembangan organisasi antara lain mencakup rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan kemampuan, ukuran, dan kompleksitas usaha Bank Umum.

2. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Rencana pengembangan sistem informasi manajemen antara lain mencakup pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi untuk manajemen dan rencana pengembangan sistem akuntansi, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk rencana pengembangan tersebut.

3. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana pengembangan SDM antara lain rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, termasuk rencana biaya atau

anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk pegawai, Direksi, dan Komisaris Bank Umum, serta rencana pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat tertentu.

4. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Penggunaan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)

Rencana pemanfaatan tenaga kerja asing antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Rencana penggunaan tenaga alih daya (*outsourcing*) yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan, antara lain mencakup rencana jumlah yang akan digunakan dan rencana penempatan tenaga alih daya (*outsourcing*).

Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing disusun dengan mengacu pada Lampiran XVI.

K. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang dicantumkan pada Rencana Bisnis adalah produk dan/atau aktivitas baru yang tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank dan kegiatan usaha berdasarkan modal inti Bank. Pada bagian ini diuraikan mengenai rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling sedikit untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru disusun dengan mengacu pada Lampiran XVII.

L. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan yang meliputi kantor wilayah, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan/atau kantor di luar negeri untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Informasi yang dimuat dalam rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor antara lain meliputi informasi mengenai

kantor induk, rencana waktu pelaksanaan, perkiraan investasi, lokasi, dan keterangan lainnya.

Informasi mengenai lokasi untuk setiap jenis kantor, paling sedikit mencantumkan lokasi kabupaten atau kota secara jelas, dan untuk lokasi kantor yang berada di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling sedikit mencantumkan nama kota administrasi atau kabupaten administrasi. Khusus untuk kantor yang berlokasi di luar negeri, mencantumkan nama kota dan negara.

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor disusun dengan mengacu pada Lampiran XVIII.

M. Informasi Lainnya

Informasi lainnya memuat rencana-rencana lain yang perlu diuraikan (jika ada) namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan pada huruf A sampai dengan huruf L, antara lain langkah-langkah penyelesaian kredit yang bermasalah termasuk agunan yang diambil alih (AYDA), aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank, *linkage program*, dan/atau pengembangan pelayanan Bank Umum.

Pengembangan pelayanan mencakup antara lain informasi rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah, rencana pengembangan sarana elektronik untuk kebutuhan nasabah, rencana upaya perlindungan nasabah, dan rencana penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Cakupan informasi yang dimuat dalam rencana upaya perlindungan nasabah meliputi antara lain rencana kegiatan edukasi dan rencana peningkatan sistem pelayanan pengaduan nasabah.

Pengertian AYDA mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

III. LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan Bank Umum secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Laporan Realisasi Rencana Bisnis paling sedikit mencakup:

a. penjelasan ...

- a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus, dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya;
- b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi;
- c. tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
- d. rasio keuangan dan pos-pos tertentu; dan
- e. informasi lainnya, berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal selain yang dijelaskan pada huruf a sampai dengan huruf d, antara lain meliputi laporan realisasi perubahan jaringan kantor dan laporan realisasi tenaga kerja asing.

Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara umum disusun dengan mengacu pada:

- a. Lampiran XIX.A. : Laporan Realisasi Rencana Bisnis
 - b. Lampiran XIX.B. : Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu
 - c. Lampiran XIX.C. : Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
 - d. Lampiran XIX.D. : Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan kepada Tenaga Pendamping
2. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Cakupan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disusun oleh Dewan Komisaris paling sedikit meliputi penilaian mengenai:
- a. pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis;
 - b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Umum secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), serta profil risiko Bank Umum terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas;
 - c. upaya memperbaiki kinerja Bank Umum, dalam hal dari hasil penilaian sebagaimana pada huruf b terjadi penurunan kinerja.

Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai dengan huruf c, dapat dilengkapi pula dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Umum.

Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris, Bank Umum harus memiliki mekanisme internal dalam rangka penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun dengan mengacu pada Lampiran XX.

IV. JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank, Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, dalam hal:

1. Bank menyampaikan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan/atau
2. Bank Umum menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Bank Umum dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dalam hal sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan, Bank Umum belum menyampaikan laporan dimaksud.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan contoh untuk menyusun Rencana Bisnis Tahun 2017. Untuk penyusunan Rencana Bisnis periode berikutnya, pencantuman tahun hendaknya disesuaikan.

Lampiran I sampai dengan Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana